

## **Peran Manajemen Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Penyusunan, Monitoring Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara**

**Agusmiati<sup>1</sup>, Nasir Hamzah<sup>2</sup>, Rosnaini Daga<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Manajemen Fakultas Pascasarjana Universitas Fajar*

### **Abstrak**

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen sistem informasi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah. Sistem informasi yang terkelola dengan baik mampu menyediakan data yang valid dan real-time, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta konsistensi dalam pemanfaatan sistem.

*Kata Kunci : Manajemen Sistem Informasi, Efektivitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi*

### **Abstract**

*The study employs a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as interviews and document analysis. This research aims to examine and describe the utilization of the Local Government Information System (SIPD) in the drafting of regional planning documents, as well as to identify and describe strategies for enhancing the use of the SIPD in regional planning. The research findings indicate that the management of the information system contributes significantly to improving the quality of regional planning documents. A well-managed information system facilitates the provision of valid, real-time data, strengthens coordination among regional government agencies, and enhances decision-making efficiency. However, the study also identifies challenges regarding limited human resources and technological infrastructure, as well as issues concerning consistency in system utilization.*

*Keywords: Information System Management, Planning Effectiveness, Monitoring and Evaluation*

Copyright (c) 2026 **Putri Emilia**<sup>1</sup>

✉ Corresponding author :

Email Address : agusmiati2@gmail.com

## PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menjamin konsistensi antara kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dalam era digital, proses perencanaan dan penganggaran daerah dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Agar perencanaan pembangunan berhasil, prinsip perencanaan yang baik tidak dapat dipisahkan, sedangkan prinsip perencanaan yang baik adalah melihat situasi saat ini, kegagalan masa lalu, potensi, tantangan dan hambatan yang ada dan ancaman menjadi peluang, dengan partisipasi dan koordinasi pemangku kepentingan, dengan tetap mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, demokrasi, transparansi, realisme, legitimasi, dan praktik (Reni, 2021). Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform digital yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dikeluarkannya aturan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dimana Sistem informasi pemerintahan daerah memiliki kemampuan dalam mengelola data juga informasi yang berhubungan terhadap perencanaan pembangunan daerah, dengan melibatkan beberapa elemen yang relevan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga berfungsi untuk memfasilitasi penyusunan dokumen penting seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD). Dengan demikian, analisis serta profil pelaksanaan pembangunan daerah dapat diperoleh dengan mudah, dan informasi ini mampu dimanfaatkan sebagai dasar dalam memperbarui data serta informasi perencanaan pembangunan daerah. Menurut Pesak et al. (2021), Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) memiliki sejumlah tujuan penting, antara lain: Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan, pada tingkatan daerah atau juga pusat,

menunjukkan kemudahan proses monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyediakan data dan informasi yang relevan untuk menyusun pembangunan daerah serta kebijakan yang tepat, mendukung penetapan prioritas permasalahan yang dihadapi pada daerah, meningkatkan kualitas produk kebijakan publik, memajukan potensi ekonomi di masing-masing daerah.

Berdasarkan pendapat Inzany et al. (2022), penerapan aplikasi berbasis website ini terdapat tujuan dalam meningkatkan juga mempermudah percepatan pada pelaksanaan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik oleh pemerintah daerah pada seluruh Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya, penerapan aplikasi ini di lingkungan Pemerintahan Daerah tidaklah mudah. Diperlukan kerjasama antar instansi, penguatan regulasi, juga waktu yang cukup dalam memastikan implementasinya berlangsung secara seragam di seluruh Pemerintahan Daerah di Indonesia. Mengingat bahwa program pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini merupakan proyek strategis untuk pertahanan nirmiliter negara. (Jauhari 2023).

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di tingkat daerah merupakan salah satu bentuk inovasi kebijakan dalam rangka modernisasi tata kelola pemerintahan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menghadirkan kelebihan berupa integrasi data pembangunan, peningkatan transparansi, serta penguatan akuntabilitas dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi. Namun demikian, penerapan sistem ini juga menghadapi sejumlah kekurangan, terutama terkait keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur digital yang belum merata, serta tantangan konsistensi data antar sektor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berpotensi mendukung terwujudnya kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*), efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, dukungan teknologi, dan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola perubahan. Secara akademik, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat dipahami dalam kerangka teori kebijakan publik dan tata kelola digital (*digital governance*). Kehadiran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mencerminkan pergeseran paradigma dari tata kelola tradisional menuju tata kelola berbasis teknologi informasi, di mana data menjadi instrumen utama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan konsep *evidence-based policy* yang menekankan pentingnya penggunaan data dan informasi yang valid untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Namun, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur digital di daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi. Dengan demikian, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak hanya relevan sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai objek kajian akademik yang menyoroti interaksi antara inovasi teknologi, kesiapan institusi, dan dinamika sosial dalam konteks pemerintahan daerah.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.

Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. (Iman Gunawan:2016).

Data kualitatif bersifat tidak terstruktur dalam arti variasi data yang diberikan oleh sumbernya (orang, partisipasi, atau responden yang ditanyai) sangat beragam. Kondisi ini memang disengaja oleh periset karena tujuannya untuk memperoleh ide atau pandangan yang mendalam dan luas dari tiap partisipan. Kebebasan partisipan dalam menyampaikan pendapat membuat periset mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik atas masalah yang sedang diteliti.

Oleh karena itu, data kualitatif cenderung digunakan dalam riset eksploratori. (Istijanto:2005). Menurut David Williams dalam (Alaslan, A., Daga, R., Kartikawati et al : 2023) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. (Prastowo:2014)

Menurut Bogdan dan Taylor dalam , Arifandy, I., Daga, R., & Didiharyono, D. (2023) tentang metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang dapat diamati. (Lexy J. Moleong:2015).

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori. (V.Wiratna Sujarweni:2015). Informan ini tersebar di beberapa perangkat daerah kunci, antara lain:

- a. Bappedalitbang sebagai koordinator utama perencanaan dan evaluasi.
- b. Inspektorat sebagai pengawas dan evaluator kebijakan.
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang mengintegrasikan

- perencanaan dengan penganggaran.
- d. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (DKIP) yang mendukung infrastruktur dan tata kelola data.
  - e. Serta OPD sektor (misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPUPR, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, DPMD, dll.) yang menyusun Renstra dan melakukan input SIPD secara rutin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

**Tabel 1 Daftar Nama Informan, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Wawancara**

| No | Nama dan Jabatan                                                                                                                              | Ditujuk sebagai       | Waktu Pelaksanaan | Tempat /Lokasi                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Utam Ferdian,<br>S.T Kabid.<br>Perencanaan.<br>Pengendalian dan Evaluasi<br>Pembangunan<br>Daerah Bappeda<br>Litbang<br>Kabupaten<br>Bulungan | Informa<br>n<br>Kunci | 14 April 2026     | Di Ruang Kerja<br>Kepala Bidang<br>Perencanaan.<br>Pengendalian dan Evaluasi<br>Pembangunan<br>Daerah Bappeda<br>Litbang Kabupaten<br>Bulungan |
| 2  | Fajar Sidiq<br>Abdul<br>Mutholib,<br>S.Sos<br>Penelaah<br>Teknis<br>Kebijakan<br>Bappeda<br>Litbang<br>Kabupaten<br>Bulungan                  | Informa<br>n<br>Utama | 14 April 2026     | Di Ruang Kerja<br>Bidang Perencanaan.<br>Pengendalian dan Evaluasi<br>Pembangunan<br>Daerah Bappeda<br>Litbang Kabupaten<br>Bulungan           |
| 3. | Fazli Hilmy<br>Pradana,<br>S.Tr.IP<br>Penelaah<br>Teknis<br>Kebijakan<br>Bappeda<br>Litbang<br>Kabupaten<br>Bulungan                          | Informa<br>n<br>Utama | 21 April 2026     | Di Ruang Kerja<br>Bidang Perencanaan.<br>Pengendalian dan Evaluasi<br>Pembangunan<br>Daerah Bappeda<br>Litbang Kabupaten<br>Bulungan           |

|    |                                                                                            |                    |               |                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Nurhuda, S.P Sub bagian Perencanaan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan            | Informan Pendukung | 22 April 2026 | Diruang Sub Bagian Perencanaan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan |
| 5  | Lenny Zul Agfiani, S.E. Sub Bagian Perencanaan Keuangan Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan | Informan Pendukung | 22 April 2026 | Diruang Sub Bagian Perencanaan Keuangan Bappedalitbang Kabupaten Bulungan  |

*Sumber : Peneliti (April 2026)*

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SIPD memberikan dampak positif, meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan wawancara yang sebelumnya telah dilakukan dengan Utam Ferdian, S.T selaku Kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Bulungan sekaligus sebagai informan kunci pada tanggal 14 April 2026 sebagai berikut:

*“Dalam penyusunan dokumen perencanaan, SIPD membantu Bappeda Litbang melakukan konsolidasi terhadap usulan perangkat daerah. Sistem ini memudahkan operator dan tim perencana untuk melihat kesesuaian antara program perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah. SIPD juga membantu menjaga hubungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Apabila terdapat program, indikator, atau target yang tidak selaras, Bappeda dapat melakukan pemeriksaan sebelum tahapan perencanaan dilanjutkan. Dengan adanya SIPD, kami merasa proses pengumpulan data menjadi jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Sistem ini membantu kami mengintegrasikan data dari berbagai unit kerja tanpa kesalahan manual yang sering terjadi sebelumnya. Transparansi juga meningkat karena data dapat diakses dan diperiksa lebih mudah oleh pihak yang berkepentingan. Meski pada awalnya ada tantangan dalam mempelajari sistem baru ini, sekarang kami merasa lebih percaya diri. Dengan SIPD, pekerjaan yang biasanya memakan waktu sehari-hari sekarang dapat diselesaikan dalam beberapa jam. Ini tentu membantu kami fokus pada tugas lain yang juga penting”. (Utam Ferdian, S.T wawancara 14 April 2026).*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa SIPD telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi dokumen perencanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Dengan sistem ini, integrasi data dari berbagai unit kerja menjadi lebih mudah dilakukan. Ini

tidak hanya meringankan kerja tangan, tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Namun dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan teknis yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah koneksi jaringan yang tidak stabil, yang seringkali menghambat akses dan pengolahan data di dalam sistem. Hal ini sesuai dengan wawancara yang sebelumnya telah dilakukan dengan Fajar Sidiq Abdul Mutholib, S.Sos selaku admin SIPD sebagai berikut:

*"Stabilitas jaringan sering menjadi masalah, sehingga akses ke sistem kadang terhambat. Ketika jaringan tidak stabil, proses input data menjadi lebih lama karena halaman SIPD sering mengalami keterlambatan saat dimuat. Pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang batas waktu penginputan, akses ke sistem menjadi lebih lambat karena banyak pengguna yang masuk secara bersamaan. Kondisi ini mengharuskan kami untuk lebih berhati-hati dalam memastikan data yang telah diinput benar-benar tersimpan dengan baik di sistem" (Fajar Sidiq Abdul Mutholib, S.Sos wawancara 15 April 2026).*

Ia menambahkan bahwa meskipun tantangan tersebut ada, potensi SIPD untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas sangat besar. Selain itu, kurangnya pemahaman teknis dari sebagian pegawai mengenai fitur-fitur SIPD menjadi hambatan dalam memanfaatkan sistem secara optimal.

*" SIPD membantu meningkatkan transparansi karena seluruh data perencanaan, program, kegiatan, dan indikator kinerja tercatat dalam satu sistem yang dapat ditelusuri dengan jelas. Dengan adanya data yang terintegrasi, proses pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan dan setiap perubahan data dapat diketahui sumber serta waktu perubahannya. Hal ini membuat proses perencanaan dan evaluasi menjadi lebih akuntabel karena didasarkan pada data yang terdokumentasi dengan baik. Beberapa staf masih membutuhkan pelatihan tambahan karena tidak semua orang memahami fitur-fitur sistem dengan optimal. Hal ini sedikit memperlambat proses di awal penerapan. Dengan peningkatan infrastruktur dan pelatihan berkelanjutan, saya yakin SIPD bisa menjadi sistem yang benar-benar mempermudah pekerjaan kami. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi elemen penting yang memengaruhi keberhasilan penerapan SIPD" (Fajar Sidiq Abdul Mutholib, S.Sos. wawancara 15 April 2026).*

Berdasarkan hasil evaluasi, tidak semua staf baik itu di Bappedalitbang maupun Perangkat Daerah lainnya memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mengoperasikan sistem ini. Hal ini mengindikasikan perlunya pelatihan tambahan yang lebih terarah agar semua pegawai dapat menggunakan SIPD dengan baik. Dari perspektif kepatuhan terhadap regulasi, penerapan SIPD telah mendukung Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan dalam memenuhi standar yang diimplementasikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan peraturan keuangan lainnya. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kekurangan dalam hal validasi data, yang disebabkan oleh proses input manual yang tidak sepenuhnya akurat.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa SIPD memiliki potensi besar untuk mengembangkan keterbukaan dalam manajemen perencanaan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, pengawasan terhadap alokasi dan penggunaan anggaran menjadi lebih efektif. Selain itu, dokumen perencanaan yang dihasilkan melalui SIPD lebih mudah diaudit karena data sudah terstruktur dengan baik di dalam sistem. Ada beberapa langkah strategis yang direkomendasikan. Penerapan SIPD di Kabupaten Bulungan menghadapi beberapa faktor penghambat utama. Salah satu penghambat terbesar adalah infrastruktur teknologi yang belum memadai, seperti jaringan internet yang sering tidak stabil. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan dalam proses pengelolaan dan pelaporan data keuangan.

Kurangnya pemahaman teknis dari pengguna sistem juga menjadi tantangan. Banyak pegawai yang masih kesulitan dalam mengoperasikan fitur-fitur tertentu di SIPD, terutama pegawai yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Faktor lain yang turut menghambat adalah terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mendukung pembaruan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia (SDM). Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang sebelumnya telah dilakukan dengan Fazli Hilmy Pradana, S.Tr.IP selaku admin SIPD, yang mengungkapkan bahwa keterbatasan dana menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas sistem serta SDM terkait sebagai berikut:

*“Kami menyadari bahwa kendala seperti koneksi internet yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman teknis pada sebagian staf dapat menghambat kinerja sistem. Untuk mengatasinya, kami telah mengusulkan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan. Kami juga telah mengadakan pelatihan rutin yang dirancang khusus untuk staf yang menggunakan SIPD” (Fazli Hilmy Pradana, S.Tr.IP wawancara 21 April 2026).*

Meningkatkan infrastruktur teknologi, seperti penyediaan jaringan internet yang lebih stabil, menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung kelancaran operasional SIPD. Infrastruktur yang memadai akan membantu mengatasi kendala teknis yang selama ini sering terjadi. Kedua, pelatihan dan pendampingan secara berkala perlu diberikan kepada pegawai yang bertugas menggunakan SIPD.

Program pelatihan ini harus dirancang sedemikian rupa agar dapat meningkatkan pemahaman teknis dan keterampilan pegawai, sehingga mereka mampu memanfaatkan semua fitur yang tersedia di dalam sistem. Evaluasi berkala terhadap penerapan SIPD juga diperlukan untuk memastikan sistem ini tetap relevan dengan kebutuhan data perencanaan yang dinamis. Evaluasi ini dapat mencakup tinjauan terhadap kinerja sistem, tingkat kepuasan pengguna, serta identifikasi area yang memerlukan perbaikan. Penerapan SIPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan telah memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelaporan keuangan. Namun, untuk mengoptimalkan manfaat dari sistem ini, diperlukan upaya peningkatan infrastruktur, pengembangan kapasitas SDM, dan

penyempurnaan fitur sistem. Tidak hanya kendala jaringan dan SDM, masih terjadi beberapa kendala dalam penggunaan SIPD seperti :

*“Efektivitas SIPD masih dipengaruhi oleh kualitas data yang dimasukkan oleh perangkat daerah. Data yang terlambat, tidak lengkap, tidak konsisten, atau belum disertai sumber yang jelas akan mengurangi kualitas informasi yang dihasilkan sistem. SIPD dapat menyediakan struktur dan fasilitas pengolahan data, sedangkan kebenaran substansi tetap bergantung pada perangkat daerah sebagai produsen data serta proses verifikasi yang dilakukan oleh Bappeda. Kendala teknis juga berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan SIPD. Beberapa kendala yang dapat muncul meliputi lambatnya akses sistem pada periode penginputan serentak, perubahan menu, penyesuaian nomenklatur, pembatasan hak akses, dan proses perbaikan data yang harus melalui tahapan tertentu. Kondisi tersebut dapat memperlambat pekerjaan operator, terutama ketika jadwal penyusunan dokumen perencanaan cukup terbatas.*

*Dalam konteks monitoring dan evaluasi di Kabupaten Bulungan, penggunaan E-Monev RKPD dapat mendukung penyajian data realisasi yang lebih terperinci. Namun, penggunaan SIPD dan sistem pendukung daerah perlu disertai rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan data. Penginputan berulang pada beberapa aplikasi juga perlu dikurangi karena menambah beban operator dan membuka kemungkinan terjadinya ketidaksamaan informasi” (Fazli Hilmy Pradana, S.Tr.IP wawancara 21 April 2026).*

Era Digital ini tidak bisa terlepas dari yang namanya data, SIPD juga tidak terlepas dengan namanya basis data, jadi Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan manajemen SIPD agar lebih efektif dalam mendukung tata kelola perencanaan berbasis data.

Pembagian tugas antara produsen data, walidata, perangkat daerah, operator SIPD, dan Bappeda juga perlu dipertegas. Setiap perangkat daerah harus menunjuk operator dan pejabat penanggung jawab data. Operator menjalankan proses teknis penginputan, sedangkan pejabat penanggung jawab memastikan kebenaran substansi data. Bappeda melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dengan dokumen perencanaan. Pembagian tersebut perlu dituangkan dalam surat keputusan, standar operasional prosedur, dan jadwal kerja yang berlaku untuk seluruh perangkat daerah.

Strategi berikutnya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Pelatihan SIPD sebaiknya tidak dilaksanakan satu kali pada awal penerapan. Perubahan fitur, nomenklatur, dan kebijakan membutuhkan pembaruan pengetahuan operator. Bappeda dapat menyelenggarakan klinik SIPD secara berkala, pendampingan per bidang, simulasi penginputan, serta penyusunan panduan singkat berdasarkan permasalahan yang sering terjadi. Regenerasi operator juga penting agar proses perencanaan tidak bergantung pada satu pegawai. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Lenny Zul Agfiani, S.E selaku PPK Bappedalitbang, yang mengungkapkan bahwa :

*"Keberadaan SIPD memiliki peran yang sangat krusial dan transformatif dalam menjembatani proses perencanaan, penganggaran, hingga monitoring-evaluasi (monev) agar menjadi satu kesatuan sistem yang terintegrasi (end-to-end).*

*Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan SIPD merupakan single source of truth data pembangunan. Aplikasi ini mengunci konsistensi alur perencanaan dari level makro hingga mikro – mulai dari visi-misi Kepala Daerah (RPJMD), rencana strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga ke Renja dan penganggaran (KUA-PPAS dan APBD). Keberadaan SIPD meminimalisir adanya 'program selundupan' atau kegiatan yang tidak memiliki dasar dokumen perencanaan di atasnya, karena sistem menerapkan pembatasan (input validation) yang ketat. Selanjutnya terkait Monitoring dan Evaluasi SIPD mempermudah pelacakan realisasi program secara real-time. Melalui kodifikasi dan klasifikasi yang seragam secara nasional, kami di rumpun perencanaan dapat memantau apakah target indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja program telah diinput dan dijalankan oleh masing-masing SKPD"* (Lenny Zul Agfiani, S.E wawancara 22 April 2026)

Selanjutnya untuk Tingkat Efektivitasnya harus diakui, dari sisi konsep tata kelola, SIPD sangat efektif menciptakan standardisasi dan transparansi nasional. Namun, dari sisi teknis operasional, efektivitasnya masih sering dinamis. Kendala berkala seperti perlambatan server (*traffic overload*) saat periode puncak input data, atau penyesuaian fitur yang sering dilakukan di tengah jalan oleh pusat, terkadang menghambat ritme kerja di daerah. Jadi, perannya sudah sangat baik secara regulasi sistem, namun efektivitasnya masih memerlukan stabilitas teknis."

Strategi pertama yang perlu diterapkan di tingkat daerah adalah memastikan SIPD tidak berdiri sebagai *silo* data tersendiri. Perlu ada jembatan integrasi (API) yang kuat antara data makro daerah (seperti data kemiskinan, stunting, gender/GEDSI, dan statistik sektoral lainnya) ke dalam proses analisis di SIPD. Perencanaan berbasis data baru bisa terwujud jika penginputan program di SIPD didasari oleh analisis *baseline* data riil yang ada di lapangan. Selanjutnya dengan melakukan bimtek atau *coaching clinic* berkala yang tidak hanya mengajarkan cara mengklik menu di SIPD, tetapi melatih pemahaman substansi mengenai hubungan kausalitas antara input, output, outcome, dan dampak (*logical framework/performance tree*) dalam sistem.

Selanjutnya Perlu ada SOP internal pemerintahan daerah yang mengatur jadwal ketat, pembagian rapor kinerja input SKPD, serta mitigasi risiko apabila sistem pusat mengalami *downtime*. Dengan adanya SOP lokal, kedisiplinan *user* dalam memperbarui data capaian target dapat terjaga tanpa harus menunggu tenggat waktu kritis dari pusat."

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Nurhuda, S.P selaku PPK Dinas Pertanian, yang mengungkapkan bahwa;

*"Manajemen SIPD berperan sebagai pusat data terpadu yang meminimalisir kesalahan input manual. Di Dinas Pertanian, ini sangat krusial untuk sinkronisasi data kebutuhan sarana prasarana pertanian, benih, atau program penyuluhan agar sesuai dengan data di Bappeda. Penggunaan aplikasi memungkinkan penginputan*

*dokumen perencanaan (seperti Renja/RKA) dilakukan dengan lebih terstruktur. Hal ini mempercepat proses administratif dibandingkan metode manual yang rentan terhadap human error dan keterlambatan birokrasi. Manajemen sistem memberikan akses kontrol yang lebih baik bagi pimpinan untuk memantau apakah usulan program/kegiatan di Dinas Pertanian selaras dengan kebijakan prioritas daerah atau RPJMD” (Nurhuda, S.P wawancara 22 April 2026)*

SIPD memungkinkan monitoring capaian kinerja secara berkelanjutan. Untuk Dinas Pertanian, ini membantu memantau serapan anggaran dan progres fisik kegiatan pertanian di lapangan (misal: pembangunan irigasi atau bantuan alat mesin pertanian) secara *real-time*.

Secara konseptual, manajemen SIPD sangat efektif meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyusunan hingga evaluasi dokumen perencanaan di Dinas Pertanian. Namun, efektivitas operasional sangat bergantung pada Pelatihan berkelanjutan bagi seluruh staf, bukan hanya admin, Dukungan infrastruktur (jaringan dan perangkat), Ketegasan manajemen internal dalam menerapkan *standard operating procedure* (SOP) digital agar tidak ada lagi pekerjaan yang dilakukan di luar sistem.

## Pembahasan

### 1. Peran Manajemen Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Efektivitas Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah

Pembahasan mengenai peran manajemen Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap efektivitas penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen perencanaan daerah dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut menjadi indikator untuk menilai sejauh mana implementasi SIPD mampu mendukung penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bulungan.

#### a) Komunikasi

Menurut George C. Edward III dalam Daga, R., Tandililing, T., & Abd Samad, A. (2025) komunikasi merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Komunikasi yang efektif ditunjukkan melalui adanya penyampaian informasi (transmission), kejelasan informasi (clarity), dan konsistensi informasi (consistency) kepada seluruh pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kabupaten Bulungan telah didukung oleh komunikasi yang cukup baik antara Bappedalitbang sebagai koordinator dengan perangkat daerah. Sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan operator SIPD, serta koordinasi rutin menjelang penyusunan RKPD, Renja Perangkat Daerah, maupun evaluasi pembangunan telah menjadi media penyampaian informasi mengenai tata cara penggunaan SIPD.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek *transmission* telah berjalan karena seluruh perangkat daerah memperoleh informasi yang sama mengenai prosedur penggunaan SIPD. Dari sisi *clarity*, petunjuk teknis yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun pendampingan oleh administrator SIPD Kabupaten Bulungan membantu aparaturnya memahami mekanisme input data, penyesuaian indikator, hingga proses validasi dokumen.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa komunikasi belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa informan menyampaikan bahwa perubahan menu, penyesuaian regulasi, maupun pembaruan aplikasi SIPD sering terjadi dalam waktu yang relatif singkat sehingga membutuhkan penyesuaian kembali oleh operator. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian perangkat daerah mengalami keterlambatan dalam melakukan input maupun revisi dokumen.

Berdasarkan perspektif Edward III, komunikasi implementasi SIPD di Kabupaten Bulungan telah berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan peningkatan terutama dalam menjaga konsistensi informasi setiap kali terjadi perubahan sistem agar seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang seragam.

b) Sumber Daya

Edward III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, kewenangan maupun fasilitas pendukung.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa SIPD telah memberikan manfaat yang signifikan dalam mempercepat penyusunan dokumen perencanaan, meningkatkan integrasi data antar perangkat daerah, serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi pembangunan. Akan tetapi efektivitas tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan sumber daya yang memadai.

Dari sisi sumber daya manusia, masih terdapat perbedaan kemampuan aparaturnya dalam mengoperasikan SIPD. Sebagian operator telah memahami mekanisme sistem dengan baik, sementara sebagian lainnya masih bergantung pada administrator Bappedalitbang ketika terjadi kendala teknis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi aparaturnya belum merata sehingga mempengaruhi kualitas pengelolaan data.

Selain SDM, faktor infrastruktur juga menjadi kendala yang cukup dominan. Beberapa informan mengungkapkan bahwa gangguan jaringan internet, akses server yang lambat, serta meningkatnya jumlah pengguna pada periode penyusunan dokumen menyebabkan proses input data sering mengalami hambatan.

Walaupun demikian, dari sisi kewenangan kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Bulungan telah menetapkan Bappedalitbang sebagai koordinator penyelenggaraan SIPD sehingga proses

koordinasi relatif berjalan dengan baik. Dengan demikian, variabel sumber daya menurut Edward III menunjukkan bahwa efektivitas SIPD sangat dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas SDM serta penyediaan infrastruktur teknologi yang lebih memadai.

c) Disposisi

Disposisi dalam teori Edward III berkaitan dengan komitmen, sikap, dan kemauan implementor dalam menjalankan suatu kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur memiliki komitmen yang baik dalam menerapkan SIPD sebagai sistem utama penyusunan dokumen perencanaan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pemanfaatan SIPD dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, serta dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan.

Komitmen tersebut didorong oleh adanya regulasi nasional yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah menggunakan SIPD sebagai satu-satunya platform penyelenggaraan perencanaan pembangunan. Aparatur menyadari bahwa penggunaan SIPD bukan lagi merupakan pilihan, melainkan bagian dari reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya sikap adaptasi yang berbeda-beda antar aparatur. Sebagian pegawai telah mampu memanfaatkan SIPD secara optimal, sedangkan sebagian lainnya masih mengalami resistensi terhadap perubahan akibat kebiasaan menggunakan sistem manual sebelumnya.

Dalam perspektif Edward III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa disposisi implementor secara umum sudah mendukung implementasi SIPD, tetapi keberhasilannya masih dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam beradaptasi terhadap perubahan teknologi informasi.

d) Struktur Birokrasi

Variabel terakhir dalam teori Edward III adalah struktur birokrasi yang meliputi pembagian tugas, Standard Operating Procedure (SOP), serta koordinasi antar organisasi pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kabupaten Bulungan telah memiliki struktur pelaksanaan yang jelas. Bappedalitbang bertindak sebagai leading sector dalam penyelenggaraan SIPD bidang perencanaan, sedangkan masing-masing perangkat daerah bertanggung jawab terhadap penginputan data sesuai kewenangannya.

Penerapan SOP penyusunan dokumen melalui SIPD juga membantu menciptakan proses kerja yang lebih sistematis. Tahapan penyusunan Renja, RKPD, monitoring, hingga evaluasi telah mengikuti alur yang ditentukan dalam aplikasi sehingga mampu mengurangi kesalahan administrasi.

Meskipun demikian, koordinasi lintas perangkat daerah masih menghadapi tantangan terutama dalam sinkronisasi data antar sektor. Perbedaan waktu input data, perubahan indikator, maupun keterlambatan pembaruan informasi menyebabkan proses validasi sering membutuhkan waktu tambahan.

Berdasarkan teori Edward III, struktur birokrasi implementasi SIPD di Kabupaten Bulungan telah berjalan cukup baik karena memiliki pembagian kewenangan yang jelas, tetapi masih memerlukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah agar integrasi data dapat berlangsung lebih optimal.

## **2. Strategi Optimalisasi Manajemen Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Mendukung Tata Kelola Perencanaan Berbasis Data**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Bulungan telah memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen perencanaan daerah. SIPD mampu mempercepat proses penyusunan dokumen, meningkatkan integrasi data antar perangkat daerah, serta mendukung proses monitoring dan evaluasi pembangunan secara lebih sistematis. Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala yang masih mempengaruhi efektivitas implementasi SIPD, antara lain perubahan aplikasi yang relatif cepat, kemampuan aparatur yang belum merata, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta koordinasi lintas perangkat daerah yang belum sepenuhnya optimal.

Dalam perspektif George C. Edward III dalam Malik, A., Mujahid, M., & Daga, R. (2025) menjelaskan tentang keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan suatu sistem, tetapi juga oleh bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi dikelola secara terpadu. Oleh karena itu, strategi optimalisasi manajemen SIPD perlu diarahkan pada penguatan keempat variabel tersebut agar tata kelola perencanaan pembangunan berbasis data dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

### **a) Penguatan Komunikasi sebagai Strategi Meningkatkan Keseragaman Implementasi SIPD**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi telah menjadi salah satu faktor yang mendukung implementasi SIPD di Kabupaten Bulungan. Bappedalitbang secara rutin melaksanakan sosialisasi, koordinasi, asistensi, serta bimbingan teknis kepada perangkat daerah dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Akan tetapi, dinamika perubahan aplikasi SIPD yang cukup cepat sering kali menyebabkan informasi teknis belum diterima secara seragam oleh seluruh operator perangkat daerah. Akibatnya, masih ditemukan perbedaan pemahaman mengenai tata cara input data, penyesuaian indikator, maupun prosedur validasi dokumen.

Menurut Edward III, komunikasi yang efektif harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dalam konteks penelitian ini, transmisi informasi sebenarnya telah berlangsung melalui berbagai forum koordinasi, namun aspek kejelasan dan konsistensi masih memerlukan penguatan karena perubahan sistem sering kali tidak diikuti dengan pedoman teknis yang mudah dipahami oleh seluruh pengguna.

Berdasarkan kondisi tersebut, strategi yang dapat diterapkan adalah membangun sistem komunikasi yang lebih adaptif melalui penyusunan standar komunikasi perubahan aplikasi (*change management*), penyediaan media informasi digital yang terintegrasi, penyelenggaraan klinik konsultasi SIPD secara berkala, serta pembentukan forum operator SIPD lintas perangkat daerah sebagai wadah berbagi pengalaman dan penyelesaian masalah teknis.

Strategi tersebut penting karena implementasi SIPD merupakan proses yang dinamis. Semakin cepat perubahan informasi dapat diterima dan dipahami oleh seluruh pengguna, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan penginputan data maupun keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan.

b) Penguatan Sumber Daya sebagai Fondasi Keberhasilan Implementasi SIPD

Variabel kedua menurut Edward III adalah sumber daya. Berdasarkan hasil penelitian, faktor sumber daya menjadi tantangan terbesar dalam implementasi SIPD di Kabupaten Bulungan. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan aplikasi, tetapi juga menyangkut kesiapan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet, stabilitas server, perangkat komputer, serta dukungan teknis ketika terjadi gangguan sistem.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kemampuan operator SIPD masih bervariasi. Perbedaan tingkat pengalaman menyebabkan kualitas penginputan data belum sepenuhnya seragam antar perangkat daerah. Kondisi tersebut berdampak pada proses verifikasi dan sinkronisasi data yang membutuhkan waktu lebih lama.

Selain itu, keterbatasan jaringan internet pada saat periode penyusunan dokumen maupun ketika akses pengguna meningkat secara bersamaan sering menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian dokumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SIPD tidak hanya bergantung pada kompetensi aparatur, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital.

Oleh karena itu, strategi optimalisasi yang dapat diterapkan meliputi penyusunan program pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, pelaksanaan pelatihan berbasis level kompetensi, pembentukan tenaga pendamping teknis di lingkungan

Bappedalitbang, serta peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi melalui penyediaan jaringan internet yang lebih stabil dan perangkat pendukung yang memadai.

Selain penguatan kapasitas individu, Pemerintah Kabupaten Bulungan juga perlu membangun sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management*) sehingga pengalaman dan solusi atas berbagai permasalahan SIPD dapat terdokumentasi dengan baik dan dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, peningkatan kompetensi tidak hanya bergantung pada pelatihan formal, tetapi juga berkembang melalui proses pembelajaran organisasi secara berkelanjutan.

c) Penguatan Disposisi Aparatur melalui Pembangunan Budaya Kerja Berbasis Data

Disposisi menurut Edward III berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan implementor dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, aparatur Pemerintah Kabupaten Bulungan pada dasarnya telah menunjukkan komitmen yang baik terhadap implementasi SIPD. Hal ini terlihat dari meningkatnya pemanfaatan SIPD dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan serta semakin berkurangnya penggunaan mekanisme manual.

Meskipun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan dari sistem konvensional menuju sistem digital masih memerlukan proses adaptasi. Sebagian aparatur masih memandang SIPD sebagai kewajiban administratif sehingga pemanfaatannya belum sepenuhnya diarahkan sebagai instrumen pengambilan keputusan berbasis data. Akibatnya, potensi SIPD sebagai alat analisis pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi, tetapi juga harus diikuti dengan perubahan budaya organisasi (*organizational culture*). Aparatur perlu memahami bahwa data bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Strategi yang dapat diterapkan antara lain membangun budaya kerja berbasis data melalui internalisasi nilai-nilai *evidence-based planning*, pemberian penghargaan kepada perangkat daerah dengan kualitas pengelolaan SIPD terbaik, memasukkan indikator pemanfaatan SIPD ke dalam penilaian kinerja organisasi, serta meningkatkan kepemimpinan transformasional yang mampu mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan teknologi.

Dengan strategi tersebut, implementasi SIPD tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari budaya organisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern.

d) Penguatan Struktur Birokrasi melalui Integrasi Tata Kelola Perencanaan

Variabel terakhir menurut Edward III adalah struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan telah memiliki pembagian tugas yang cukup jelas dalam implementasi SIPD. Bappedalitbang berperan sebagai koordinator penyelenggaraan perencanaan, sedangkan perangkat daerah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan penginputan data sesuai kewenangannya masing-masing.

Walaupun struktur organisasi telah terbentuk dengan baik, penelitian menemukan bahwa koordinasi lintas perangkat daerah masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam sinkronisasi data, kesesuaian indikator kinerja, serta waktu penyampaian informasi. Perbedaan tingkat kesiapan masing-masing perangkat daerah menyebabkan proses validasi data sering memerlukan koordinasi tambahan.

Menurut perspektif Edward III dalam Naim, M., Daga, R., & Samad, A. (2023) tentang struktur birokrasi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan SOP, tetapi juga oleh kemampuan organisasi mengurangi fragmentasi antar unit kerja. Oleh karena itu, strategi optimalisasi perlu diarahkan pada peningkatan integrasi proses bisnis perencanaan daerah.

Langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain menyempurnakan SOP penyelenggaraan SIPD secara periodik, memperjelas pembagian kewenangan antar perangkat daerah, membangun mekanisme koordinasi lintas sektor berbasis kalender perencanaan, serta memperkuat integrasi SIPD dengan sistem informasi pemerintahan lainnya seperti SIPD Keuangan, Sistem Satu Data Daerah, dan aplikasi pendukung monitoring pembangunan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu mengembangkan mekanisme evaluasi implementasi SIPD secara berkala melalui pengukuran tingkat kepatuhan perangkat daerah, kualitas data yang dihasilkan, ketepatan waktu penyampaian dokumen, dan tingkat pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Evaluasi tersebut penting sebagai dasar penyempurnaan kebijakan implementasi SIPD secara berkelanjutan.

## SIMPULAN

1. Manajemen Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen perencanaan daerah di Kabupaten Bulungan. SIPD mampu meningkatkan integrasi data, mempercepat proses penyusunan dokumen, meningkatkan akurasi informasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.
2. Strategi yang dapat diterapkan untuk optimalisasi manajemen Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar lebih efektif dalam

mendukung tata kelola perencanaan berbasis data adalah melalui penguatan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Strategi tersebut diwujudkan melalui peningkatan koordinasi dan sosialisasi, pengembangan kompetensi aparatur dan infrastruktur teknologi, penguatan komitmen terhadap pemanfaatan data, serta penyempurnaan SOP dan koordinasi lintas perangkat daerah.

## Referensi :

- Alaslan, A., Daga, R., Kartikawati, Y., Wadud, M., Pribadi, F. S., Barlian, B., ... & Rakhmawati, I. (2023). *Manajemen strategis. Internet]*, Sumatera Barat: *Global Eksekutif Teknologi*. Available from: Google Books [Accessed 25 September 2023].
- Agustino, L. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Citta, A., et al. (2020). *Sistem Informasi dan Manajemen Data*. Jakarta: Prenada Media.
- Arifandy, I., Daga, R., & Didiharyono, D. (2023). Analisis Sistem Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pada Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Sulawesi Selatan Melalui Aplikasi Reviu. *Jurnal Sains Manajemen Nitro*, 2(2), 122-137
- Dione, R., & Utami, S. (2020). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Daga, R., Tandililing, T., & Abd Samad, A. (2025). PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI, KEMUDAHAN DAN FITUR LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN MOBILE BANKING PADA PT. BANK SULSELBAR CABANG RANTEPAO. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Terapan*, 221-233.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Inzany, A., et al. (2022). [Judul publikasi tentang penerapan aplikasi berbasis website dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan publik]. [Kota: Penerbit/Jurnal].
- Islamiyah, N., Fakhriannor, & Herman. (2021). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep dan Implementasi*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Press.
- Jauhari, M. (2023). [Judul publikasi tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai proyek strategis pertahanan nirmiliter]. [Kota: Penerbit/Jurnal].
- Karla, R., et al. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahendra, A., et al. (2018). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Maramis, J., Nayoan, R., & Waworundeng, R. (2021). *Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*. Manado: Sam Ratulangi University Press.
- Malik, A., Mujahid, M., & Daga, R. (2025). MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS PENERAPAN E-TLE DI KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN). *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Terapan*, 62-86.
- Naim, M., Daga, R., & Samad, A. (2023). Pengaruh Sistem Teknologi Informasi dan Etos Kerja terhadap Kinerja Pegawai melalui Kecerdasan Spiritual. *Jurnal Sains Manajemen Nitro*, 2(2), 168-182.
- Putri, D. (2021). *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Tata Kelola Data*. Jakarta: Kencana.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*